

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendaftar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) reguler di wilayah DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) nomenklatur baru yang menggantikan PPDB sejak 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara eksplisit menyediakan jalur afirmasi prioritas pertama bagi anak penyandang disabilitas, dengan mensyaratkan calon peserta didik melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari psikolog atau dokter (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2026).

Ketersediaan jalur formal ini pada praktiknya tidak selalu diimbangi oleh kesiapan kapasitas sekolah penerima. Salah satu kendala struktural yang paling mendasar adalah minimnya jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah reguler, padahal keberadaan GPK merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pendidikan inklusi yang efektif (Zakia, 2015). Kajian kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia turut menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan (Bin & Zin, 2018). Temuan serupa dilaporkan pula pada studi implementasi pendidikan inklusif di berbagai daerah di Indonesia, yang menegaskan bahwa banyak sekolah dasar menyelenggarakan layanan inklusi tanpa dukungan sumber daya manusia yang proporsional (Juntak dkk., 2023). Akibatnya, guru kelas maupun guru mata pelajaran reguler di SDN Jakarta kerap harus mengajar siswa dengan spektrum autisme, ADHD, maupun lambat belajar (*slow learner*) secara mandiri, tanpa didampingi GPK secara konsisten.

Kondisi tersebut membebankan tekanan psikologis dan profesional yang cukup berat bagi guru-guru SDN di Jakarta. Di satu sisi, guru dituntut memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh siswa reguler, di sisi lain, mereka juga harus menyediakan akomodasi khusus bagi ABK, sering kali tanpa latar belakang pendidikan luar biasa (PLB) yang memadai. Bahkan pada sekolah yang telah memiliki GPK, beban kerja yang ditanggung tetap tidak proporsional, yakni satu GPK kerap dipaksa menangani lebih dari sepuluh siswa dengan ragam hambatan yang berbeda, sekaligus merangkap tugas administratif dan pelaporan di luar tugas pokoknya. Kondisi beban ganda semacam ini berpotensi memicu keresahan dan kelelahan emosional pada guru dalam menjalankan peran gandanya (Yuliantari & Widyasari, 2020). Risiko ini semakin nyata mengingat penelitian pada guru sekolah inklusi juga menemukan hubungan erat antara rendahnya efikasi diri dan tingginya kecenderungan *burn out* (Widyana & Nurwahyuni, 2024).

Tekanan di lapangan tersebut semakin diperberat oleh tuntutan regulasi dan kebijakan makro yang terus berkembang. Kurikulum Merdeka secara eksplisit mewajibkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar setiap peserta didik, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022). Tuntutan ini diperkuat oleh berbagai kajian implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar yang menunjukkan bahwa penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan konseptual (Sarnoto, 2024, Rahmawati, 2023). Sebuah tinjauan evaluatif terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka bahkan menegaskan bahwa kesiapan guru tidak cukup hanya berupa pemahaman konsep, tetapi juga menuntut kemampuan asesmen menyeluruh dan komitmen pengembangan profesional berkelanjutan (Marfu'ah dkk, 2025). Pada saat yang sama, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas turut menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk menyediakan penyesuaian yang layak bagi peserta didik disabilitas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, 2020). Dengan kata lain, regulasi-regulasi ini secara langsung memaksakan guru untuk menerima seluruh kondisi peserta didik, terlepas dari kesiapan mental dan kompetensi personal yang dimilikinya.

Berbagai persoalan di atas, mulai dari beban kerja lapangan hingga tuntutan kebijakan dari atas, pada akhirnya bermuara pada satu titik krusial, yaitu sikap

(*attitude*) guru terhadap pendidikan inklusi. Penelitian-penelitian awal di Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa secanggih apapun kebijakan dan sebanyak apapun fasilitas yang tersedia di SDN, keberhasilan pendidikan inklusi tidak akan tercapai apabila sikap guru terhadap ABK tetap negatif, menolak, atau diskriminatif (Fitriatun & Nopita, 2012; Elisa, 2013). Temuan ini diperkuat oleh kajian lanjutan yang menyoroti peran sentral sikap guru dalam mendukung keberhasilan implementasi inklusi di sekolah dasar (Putri & Hamdan, 2021; Musyafira & Hendriani, 2021). Pola serupa juga ditemukan dalam berbagai studi yang mengaitkan sikap guru dengan variabel psikologis lain, seperti pengetahuan awal tentang ABK dan efikasi diri (Muzdalifah & Billah, 2017; Dewi dkk., 2020; Sahna dkk, 2024). Bukti dari konteks internasional turut menunjukkan pola yang konsisten, di mana sikap guru terhadap inklusi banyak dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sistem dukungan sekolah, dan pengalaman mengajar (Saloviita, 2020; Engelbrecht dkk., 2013; Savolainen dkk., 2012). Kajian pada guru SD di Kota Semarang bahkan menunjukkan bahwa semakin tinggi respons positif guru terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, semakin tinggi pula keyakinan diri mereka dalam mengajar di kelas inklusif, dan sebaliknya (Sahna dkk., 2024). Secara teoritis, sikap guru dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya budaya sekolah, kompetensi, serta partisipasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (Minsih dkk., 2021), namun salah satu faktor internal yang paling krusial dan paling banyak diteliti adalah keyakinan guru atas kemampuan dirinya sendiri, atau yang dikenal sebagai efikasi diri (*self-efficacy*).

Efikasi diri guru, yakni keyakinan personal guru dalam mengelola kelas, merancang pembelajaran, dan melibatkan seluruh siswa dalam kondisi kelas yang inklusif, merupakan konstruk psikologis yang telah lama diteliti sebagai fondasi performa guru. Konstruk ini berakar dari teori efikasi diri yang dikemukakan Bandura (1997), dan dielaborasi lebih lanjut oleh Tschannen-Moran dan Woolfolk Hoy (2001) yang merumuskan *teacher efficacy* sebagai keyakinan guru atas kapasitasnya untuk membawa dampak positif pada hasil belajar siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam.

Dalam konteks pendidikan inklusi, sejumlah penelitian membuktikan bahwa efikasi diri guru berperan sebagai prediktor penting yang menentukan apakah seorang guru akan bersikap menerima atau menolak sistem inklusi. Temuan ini pertama kali banyak diangkat melalui studi regresi pada guru sekolah inklusi yang menunjukkan

pengaruh signifikan efikasi diri terhadap sikap guru (Muzdalifah & Billah, 2017; Fitriatun, 2016). Hasil serupa direplikasi pada konteks SDN di Jakarta dan daerah lain di Indonesia, yang menegaskan bahwa pengetahuan awal tentang ABK bersama efikasi diri secara konsisten memprediksi sikap guru terhadap inklusi (Dewi dkk., 2020; Sahna dkk., 2024). Pada jenjang PAUD, pola prediktif ini juga tetap konsisten, sebagaimana ditunjukkan pada guru yang mengelola kelas inklusif dengan tantangan pemenuhan children well-being bagi ABK (Nurul Hidayah dkk., 2026), maupun pada evaluasi pelatihan pendidikan inklusif bagi guru SMP dan SD di Kota Bontang (Aprillia, 2025; Faj'Riyah, 2025). Kajian pada guru sekolah dasar inklusi turut menegaskan urgensi efikasi diri sebagai fondasi psikologis yang mendasari kesiapan guru menghadapi keragaman peserta didik (Hidajat, 2022; Minsih dkk., 2021). Bukti tambahan dari konteks lintas kurikulum turut memperkuat pola ini, sebagaimana ditemukan pada persepsi guru sekolah dasar di kelas inklusif dengan rujukan kurikulum pendidikan Finlandia (Yuliani & Adri, 2025) dan pada studi lintas negara yang membandingkan sikap serta efikasi guru di Afrika Selatan dan Finlandia (Savolainen dkk., 2012).

Dari rentetan masalah lapangan (beban kerja dan minimnya dukungan GPK) serta tuntutan regulasi dan kebijakan (Kurikulum Merdeka dan PP Nomor 13 Tahun 2020) yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penting untuk menguji sejauh mana pengaruh efikasi diri terhadap sikap guru di SDN Jakarta dalam ekosistem pendidikan saat ini. Di samping kesenjangan konteks waktu dan regulasi kurikulum, penelitian ini juga menawarkan kebaruan dari sisi metodologis, khususnya pada spesifikasi dan validitas sosiokultural instrumen yang digunakan. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai hubungan efikasi dan sikap guru terhadap pendidikan inklusif di Indonesia cenderung menggunakan instrumen adaptasi Barat yang hanya diterjemahkan secara harfiah (*literal translation*). Pendekatan tersebut rentan memicu bias interpretasi akibat perbedaan budaya pedagogis, sistem dukungan sekolah, serta karakteristik birokrasi antara negara asal instrumen dan realitas di Indonesia. Guna mengatasi kelemahan metodologis tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua instrumen yang telah melalui proses adaptasi budaya dan pengujian psikometri yang ketat pada konteks Indonesia.

Pemilihan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di DKI Jakarta sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada karakteristik regulasi dan operasional yang berbeda secara mendasar dibandingkan Sekolah Dasar (SD) Swasta. SDN penyelenggara

inklusi terikat langsung oleh regulasi pemerintah daerah melalui Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi. Kondisi ini mewajibkan SDN menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tanpa proses seleksi ketat atau penyaringan berbasis kriteria kesiapan fasilitas formal. Berbeda dengan mayoritas SD Swasta yang memiliki fleksibilitas dalam menetapkan kuota penerimaan, membebaskan biaya tambahan untuk Guru Pendamping Khusus (GPK), atau menyediakan sarana penunjang mandiri, SDN sering kali harus mengelola kelas inklusif dengan keterbatasan ketersediaan GPK dan rasio siswa yang cukup besar. Implikasinya, tantangan terbesar penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN dibebankan langsung kepada guru kelas reguler. Oleh karena itu, efikasi diri guru di SDN menjadi faktor esensial yang memprediksi bagaimana sikap dan penerimaan mereka terhadap keberagaman peserta didik di dalam kelas.

Pada penelitian studi terdahulu, penelitian cenderung pada fokus subjek dan konteks institusionalnya. Sebagian besar riset sebelumnya di tingkat regional cenderung meneliti sekolah dasar swasta atau sekolah inklusi umum yang memiliki keleluasaan dalam seleksi penerimaan siswa dan ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di DKI Jakarta, di mana sekolah negeri terikat mutlak oleh kebijakan daerah jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tanpa proses penyaringan ketat, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan jumlah GPK. Hal inilah yang membuat tekanan psikologis dan efikasi guru di SDN Jakarta memiliki keunikan serta urgensi yang belum banyak dieksplorasi secara spesifik oleh riset terdahulu.

Berdasarkan studi pendahuluan yang juga dilakukan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusif di DKI Jakarta, ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan antara tuntutan kebijakan dengan kesiapan psikologis guru di lapangan. Penerapan Kurikulum Merdeka secara sistemik mewajibkan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menyusun *Individualized Education Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas guru kelas reguler yang pada dasarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus (non-PLB) mengalami keraguan yang tinggi terhadap kapasitas dirinya (*low self-efficacy*). Guru merasa kurang memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang modul ajar yang adekuat, mengelola dinamika kelas yang heterogen, serta menangani tantangan perilaku ABK, terlebih di tengah ketersediaan

Guru Pendamping Khusus (GPK) yang masih sangat terbatas di lingkungan SDN. Kondisi keterbatasan efikasi diri tersebut berimplikasi langsung terhadap pembentukan sikap guru (*teacher attitude*) dalam merespons kebijakan pendidikan inklusif. Keraguan atas kemampuan pribadi dalam mengajar ABK seringkali memicu kecemasan, rasa tertekan, hingga bentuk sikap yang cenderung kurang terbuka atau bahkan resisten terhadap kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler. Sebaliknya, guru yang memiliki keyakinan diri yang kuat terhadap kemampuannya cenderung memperlihatkan penerimaan yang lebih positif, fleksibel dalam adaptasi pembelajaran, serta berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Fenomena empiris ini mempertegas bahwa efikasi diri merupakan faktor penentu krusial yang memengaruhi bagaimana sikap guru dibentuk dan dimanifestasikan dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri.

Untuk mengukur efikasi diri guru, penelitian ini menerapkan *Teachers' Sense of Efficacy Scale (TSES)* versi Bahasa Indonesia yang telah divalidasi oleh Maulana dkk. (2020). Penggunaan instrumen ini sangat relevan karena konstruksinya telah diuji menggunakan Rasch modeling khusus pada populasi guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di DKI Jakarta, sehingga memiliki sensitivitas tinggi dalam memotret keyakinan personal guru di wilayah tersebut. Sementara itu, untuk variabel sikap guru, penelitian ini menggunakan instrumen *Multidimensional Attitudes Toward Inclusive Education Scale (MATIES)* yang telah diadaptasi secara lintas budaya ke dalam versi Bahasa Indonesia (*i-MATIES*) oleh Rofiah (2021) melalui prosedur Guillemín. Melalui *i-MATIES*, kendala kebahasaan dan variasi kultural dalam praktik inklusi sehari-hari telah diselaraskan dengan konteks sosiokultural guru di Indonesia tanpa mereduksi kesetaraan konseptual aslinya. Melalui kombinasi instrumen *TSES* adaptasi Maulana dkk. (2020) dan *i-MATIES* oleh Rofiah (2021), penelitian ini tidak sekadar mereplikasi studi terdahulu, melainkan memberikan rekonstruksi data yang jauh lebih presisi, kontekstual, dan bebas dari bias budaya (*cultural bias*). Dengan demikian, hasil analisis mengenai pengaruh efikasi terhadap sikap guru di SDN Jakarta dalam era kebijakan terkini dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dengan akurasi yang lebih tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan studi terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) di SDN penyelenggara inklusif. Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendaftar di SDN reguler DKI Jakarta terus meningkat melalui jalur afirmasi SPMB, namun tidak diimbangi oleh kesiapan kapasitas sekolah penerima.
- 1.2.2 Masih rendahnya pemahaman guru reguler dalam menyusun Modul Ajar *Terintegrasi atau Individualized Education Program* (IEP).
- 1.2.3 Adanya keraguan (*low efficacy*) pada guru non-PLB dalam mengelola kelas yang heterogen.
- 1.2.4 Guru SDN di Jakarta menghadapi beban ganda, yakni tuntutan memberikan pelayanan yang adil bagi seluruh siswa reguler sekaligus menyediakan akomodasi khusus bagi ABK, sering kali tanpa latar belakang pendidikan luar biasa (PLB) yang memadai.
- 1.2.5 Regulasi dan kebijakan makro (Kurikulum Merdeka dan PP Nomor 13 Tahun 2020) menuntut guru untuk menerima dan mengakomodasi seluruh kondisi peserta didik, terlepas dari kesiapan mental dan kompetensi personal yang dimiliki.
- 1.2.6 Sikap guru terhadap pendidikan inklusi diduga menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN, di luar kelengkapan kebijakan dan fasilitas yang tersedia.
- 1.2.7 Efikasi diri guru diduga menjadi salah satu prediktor penting yang memengaruhi sikap guru dalam menerima atau menolak sistem pendidikan inklusi, namun pengujian pada konteks SDN Jakarta terkini (era SPMB dan Kurikulum Merdeka) masih terbatas.
- 1.2.8 Sebagian besar instrumen yang digunakan dalam penelitian terdahulu mengenai efikasi dan sikap guru terhadap inklusi di Indonesia merupakan hasil terjemahan harfiah dari instrumen Barat, sehingga berpotensi menimbulkan bias interpretasi akibat perbedaan konteks sosiokultural.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada hal-hal berikut:

- 1.3.1 Penelitian ini berfokus pada dua variabel, yaitu efikasi diri guru (variabel bebas) dan sikap guru terhadap pendidikan inklusi (variabel terikat), tanpa menguji variabel lain yang turut memengaruhi sikap guru seperti budaya sekolah, kompetensi, atau partisipasi stakeholder. Pembatasan ini diambil untuk menjaga kedalaman analisis hubungan efikasi–sikap yang menjadi fokus utama penelitian, mengingat efikasi diri guru secara konsisten diidentifikasi dalam kajian-kajian terdahulu (Muzdalifah & Billah, 2017; Dewi dkk, 2020) sebagai salah satu prediktor psikologis internal yang paling mendasar sekaligus paling terbuka untuk diintervensi melalui program pengembangan profesional guru, sehingga relevan untuk dikaji secara terfokus dalam konteks kebijakan SPMB dan Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.
- 1.3.2 Subjek penelitian dibatasi pada guru kelas dan guru mata pelajaran reguler yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) penyelenggara pendidikan inklusi di wilayah DKI Jakarta.
- 1.3.3 Efikasi diri guru diukur menggunakan instrumen *Teachers' Sense of Efficacy Scale (TSES)* versi Bahasa Indonesia hasil adaptasi Maulana dkk. (2020).
- 1.3.4 Sikap guru terhadap pendidikan inklusi diukur menggunakan instrumen *Multidimensional Attitudes towards Inclusive Education Scale versi Bahasa Indonesia (i-MATIES)* hasil adaptasi Rofiah (2021).
- 1.3.5 Penelitian ini tidak membahas secara mendalam faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan GPK, kebijakan sekolah, atau dukungan orang tua, kecuali sebagai konteks pendukung dalam latar belakang masalah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana gambaran tingkat efikasi diri guru SDN di Jakarta dalam konteks pendidikan inklusi?
- 1.4.2 Bagaimana gambaran sikap guru SDN di Jakarta terhadap pendidikan inklusi?

- 1.4.3 Apakah terdapat pengaruh efikasi diri guru terhadap sikap guru pada pendidikan inklusi di SDN Jakarta?
- 1.4.4 Seberapa besar pengaruh efikasi diri guru terhadap sikap guru pada pendidikan inklusi di SDN Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.5.1 Mendeskripsikan gambaran tingkat efikasi diri guru SDN di Jakarta dalam konteks pendidikan inklusi.
- 1.5.2 Mendeskripsikan gambaran sikap guru SDN di Jakarta terhadap pendidikan inklusi.
- 1.5.3 Menguji pengaruh efikasi diri guru terhadap sikap guru pada pendidikan inklusi di SDN Jakarta.
- 1.5.4 Mengetahui besaran pengaruh efikasi diri guru terhadap sikap guru pada pendidikan inklusi di SDN Jakarta.
- 1.5.5 Menjelaskan secara mendalam hasil analisis kuantitatif mengenai pengaruh efikasi guru terhadap sikap guru pada pendidikan inklusi melalui wawancara dengan guru sebagai informan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritik

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu psikologi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan konstruk efikasi diri guru (*teacher self-efficacy*) dan sikap guru terhadap pendidikan inklusi, sebagaimana dikemukakan oleh Bandura (1997) dan dielaborasi oleh Tschannen-Moran dan Woolfolk Hoy (2001). Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi empiris pada konteks yang lebih mutakhir, yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Jakarta pada era kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan implementasi Kurikulum Merdeka, sekaligus memperkuat validitas sosiokultural instrumen TSES dan i-MATIES versi Bahasa Indonesia pada populasi guru sekolah dasar di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Sekolah/Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi sekolah dalam merancang program pengembangan profesional serta kebijakan pendampingan bagi guru yang mengajar di kelas inklusif, khususnya dalam upaya meningkatkan efikasi diri guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

1.6.2.2 Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi guru mengenai keterkaitan antara keyakinan diri dalam mengelola kelas inklusif dengan sikap yang ditunjukkan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kesiapan diri, baik secara kompetensi maupun secara psikologis, dalam menjalankan peran sebagai guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

